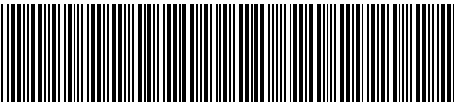




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400082/2026



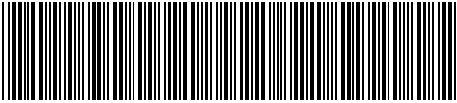
DS:6870-4761-0376-0850

A. Dasar Hukum:								
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.								
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.								
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026								
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:								
1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG					
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum					
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT					
4. Kode/Nama Satker	:	(400082)	PENGADILAN NEGERI FAK FAK					
Sebesar	:	Rp.	73.860.000	(TUJUH PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH)				
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :								
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :								
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
03.04	PERADILAN							
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :								
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				Jumlah Uang			
				Rp.	73.860.000			
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							
				Rp.	73.860.000			
C. Sumber Dana Berasal Dari :								
1. Rupiah Murni	Rp.	73.860.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0			
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :								
1. KPPN FAK - FAK	(067) Rp.	73.860.000						
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)								
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).								
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).								
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.								
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.								
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.								
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).								
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.								

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
I A. INFORMASI KINERJA

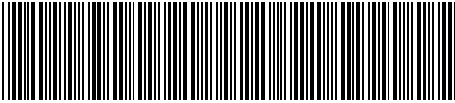


DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	73.860.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	73.860.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
		4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
		5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
		6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Umum	
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
		8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
		9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Umum	
		10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
		11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
		14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
		15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
		16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
		17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
		18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
		19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
		20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum									
	21.	14	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)						
	22.	15	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan			1.500.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2.00	kegiatan			1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	60,00	Perkara, Berkas Perkara			36.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U13	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur	60.00	Perkara			36.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	100,00	Orang			36.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	100.00	Orang			36.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara			360.000
Rincian Output	:	01	QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	2.00	Perkara			360.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
I B. SUMBER DANA



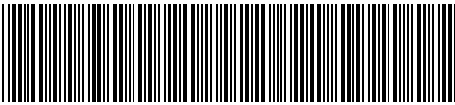
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	73.860.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	73.860.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



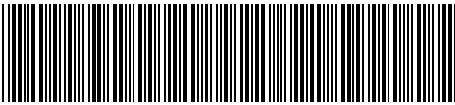
DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK	-	73.860	-	-	-	73.860	33 . 03	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	73.860	-	-	-	73.860		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	73.860	-	-	-	73.860		
1049.AEA	Koordinasi	-	1.500	-	-	-	1.500		
	(33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)								
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	36.000	-	-	-	36.000		
	(33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)								
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	36.000	-	-	-	36.000		
	(33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)								
01	RM	-	36.000	-	-	-	36.000	067	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	360	-	-	-	360	33 . 03	
	(33.03 PAPUA BARAT / KAB. FAK FAK)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK
Kewenangan : (KD)

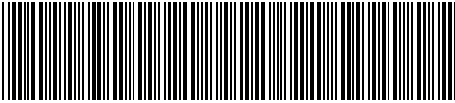
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	360	-	-	-	360	067	
JUMLAH		-	73.860	-	-	-	73.860		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (400082) PENGADILAN NEGERI FAK FAK

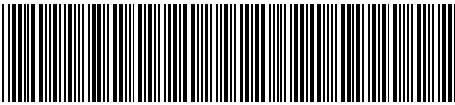
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	400082	PENGADILAN NEGERI FAK FAK														
		RENCANA PENARIKAN DANA	500	6.705	5.400	5.690	6.480	5.747	5.761	7.278	6.007	5.721	4.655	13.916	73.860	
		BELANJA BARANG	500	6.705	5.400	5.690	6.480	5.747	5.761	7.278	6.007	5.721	4.655	13.916	73.860	
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	500	6.705	5.400	5.690	6.480	5.747	5.761	7.278	6.007	5.721	4.655	13.916	73.860	
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	500	6.705	5.400	5.690	6.480	5.747	5.761	7.278	6.007	5.721	4.655	13.916	73.860	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.969	23.562	
		- PNBP (425231)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	130	
		- PNBP (425232)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
		- PNBP (425233)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.320
		- PNBP (425239)	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	1.819	21.872

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
IV A. B L O K I R



DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [400082] PENGADILAN NEGERI FAK FAK

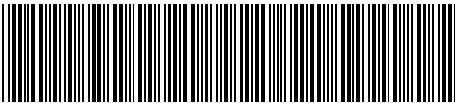
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400082/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6870-4761-0376-0850

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [400082] PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002